

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan yaitu:

1. Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance* melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kota Padang Panjang juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance* juga berhak meminta pejabat negara dilingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang, Badan Hukum dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pihak eksekutif tidak selalu memposisikan orang yang tepat untuk memimpin suatu program, DPRD hanya merekomendasikan yang memutuskan tetap eksekutif, Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance* juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan.
2. Kendala DPRD Kota Padang Panjang dalam melakukan fungsi pengawasan adalah perbedaan pandangan politik antara sesama pejabat DPRD dan Kepala Daerah dalam mewujudkan *good governance* karena DPRD merupakan jabatan politisi sama halnya dengan kepala daerah yang

sama jabatan politis oleh karena itu DPRD dengan Kepala Daerah juga memiliki konstituen masing masing. Upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang Panjang juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kota Padang Panjang, hasil dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD Kota Padang Panjang dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan maka adapun saran, yakni:

1. Perlunya suatu ketegasan untuk DPRD Kota Padang Panjang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan *good governance* agar seluruh fungsinya dapat terlaksana dengan optimal.
2. Kendala dalam fungsi pengawasan sebaiknya DPRD memikirkan solusi bagaimana mengatasinya sehingga agenda untuk mewujudkan *good governance* akan terwujud sesuai yang diharapkan. DPRD Kota Padang Panjang terus melakukan upaya penguatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik.